

TUGAS AKHIR
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR
PAJAK RESTORAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

SERLI MIRDAYATI
00976008562

PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2012

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN

OLEH :

SERLI MIRDAYATI

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing yang berlangsung pada bulan pebruari s/d april 2012. Penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh petugas pajak di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi serta untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Daerah .

Adapun Permasalahan yang sering terjadi pada kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak tidak mau melaksanakan kewajibannya dikarenakan tidak mengertinya masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan.

Hasil Penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran. Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran adalah : Dengan cara melakukan pengawasan terhadap Pajak Restoran yang ada patuh atau tidak sebagai wajib pajak dan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti arti pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan daerah .

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dari Sektor Pajak Restoran .



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr, wb

Tidak pernah berhenti Allah Subhanahuata'ala, yang telah melimpahkan kasih sayang, nikmat, rahmat dan karunianya yang sulit untuk dikira tapi dapat dirasakan, sehingga sudah sepantasnyalah kita mensyukuri dengan mengisi kehidupan ini dengan karya serta cipta yang bermanfaat bagi sisi jagad raya ini. Dan pejuang yang tak kenal lelah pun ditunjukkan oleh utusannya nabi besar Muhammad Saw dalam menapaki perjuangan demi ummat manusia dan demi kemajuan peradaban dunia.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas telah selesainya penulisan karya tulis ini dengan judul “ **Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran** “ Dalam bentuk Tugas Akhir ini, semoga dengan telah selesainya karya tulis ini dapat menjadi pemicu dan semangat dalam langkah kehidupan kedepan.

Akhirnya Penulis sangat bersyukur karena dalam bentuk kehidupan ini masih diberi rahmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahuata'ala maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat spesial dalam hidup ini yaitu Almarhum Ayahanda Jamal Mirdat dan Ibunda Jalinas, mereka adalah orang tua yang

terbaik dalam memberikan tulus kasih sayang dan motivasi diri, semoga beliau bangga dengan keberhasilan ini.

2. Bapak DR. Mahendra Romous, SP.M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan contoh terbaik selaku pemimpin dan seorang yang patut dihargai.
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum Selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah M.Si Selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu atas kelancaran dan selesainya tulisan ini.
5. Bapak Mahmuzar, M.Hum Selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian tugas akhir ini .
6. Ibu Bapak Dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu kelancaran urusan dalam suasana keakraban dan kekeluargaan.
7. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan kerjasamanya yang baik dalam memberikan bantuan data ataupun lainnya dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Tak Lupa pula buat orang yang ku sayang Abang dan Kakakku yaitu Afrial, Yusmaina, Supardi, Sukarmin, dan juga orang yang paling Aku hormati dan sangat aku banggakan yaitu Abangku Sabarman, kakak ipar ku Ferli yenti dan kaponakan ku yangSeluruh menghibur serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

9. Buat Sobatku Nurhasmah, Devinda Yanti N, Siti Nurohmah, Eka Oktriyani, Revi Handayani, Ari Mayandri, Rahimsyah, Abu Hasyim M, Syafi'i, Riandy Syaputra, Reny Safitri, Rizky Novika Sari, Reny Elfitri, Maysaroh, Fatmawati, Rahmanita, Ranti, Rany Agusmita, Eri, M Ridho, Rahmat Ing Nugraha, Wira Hendra, Riki Afrianto, Andika Saputra, Amsal, Irfan, Berta Hidayat, Renaldo Oktoberi, Khairul Sadri, M Burhan, Fitri Rahayu, Ezi Resdiva dan Azlan Siregar.
10. Dan Kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan . Amin ya Rabbal'alam.

Hanya kepada Allah SWT Subhanahuta'ala penulis berdo'a dan bermohon semoga segala kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapatkan balasan yang layak. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekanbaru, April 2012
Penulis

SERLI MIRDAYATI
Nim. 00976008562

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel II.1	Kondisi Kepegawaian Dinas Pendapatan Kab Kuantan Singingi	21
Tabel III.1	Rincian Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	37
Tabel III.2	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	38
Tabel III.3	Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	39
Tabel III.4	Kontribusi Laba Perusahaan milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	41
Tabel III.5	Kontribusi Penerimaan Lain-lain yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	42
Tabel III.6	Realisasi Pajak Restoran Kab Kuansing.....	44
Tabel III.7	Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Kuansing.....	45
Tabel III.8	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab Kuansing.....	46

Tabel III.9	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kab Kuansing.....	47
Tabel III.10	Kontribusi Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	48

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah	7
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Lokasi Penelitian	8
1.4.2 Waktu Penelitian	8
1.4.3 Jenis Data	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Data	9
1.4.5 Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuasing	12
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Tujuan dan Sasaran	13

2.4 Dasar Hukum dan Kewenangan Dispenda Kuansing.....	15
2.5 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi Uraian Tugas.....	17
2.6 Kondisi Kepegawaian.....	20
2.7 Uraian Tugas.....	22
BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	24
A. Tinjauan Teori.....	24
3.A.1 Pengertian Pajak.....	24
3.A.2 Fungsi Pajak.....	25
3.A.3 Jenis Pajak.....	25
3.A.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
3.A.5 Pengertian Pajak Restoran.....	27
3.A.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	29
3.A.7 Subjek Pajak Restoran.....	29
3.A.8 Objek Pajak Restoran.....	30
3.A.9 Dasar Pengenaan,Tarif,Perhitungan Pajak Restoran.....	30
3.A.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	32
3.A.11Pajak menurut Syari’at Islam.....	34
B. Tinjauan Praktek.....	36
3.B.1 Penerimaan sektor Pajak Restoran Kab Kuansing.....	36
3.B.2 Realisasi Pajak Restoran Kab Kuansing.....	44
3.B.3 Kontribusi Pajak Restoran Kab Kuansing.....	45
3.B.4 Jenis Pajak Kabupaten Kuantan Singingi.....	48

3.B.5 Upaya Pemerintah dalam meningkatkan pajak restoran Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
BAB IV. PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Ditinjau dari sistem keuangan negara, Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara (diantaranya Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, hampir disemua negara didunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. (Liberty Pandiangan dalam Afriandi : 2009 : 9).

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang cukup besar, telah memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan Wajib Pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak sebagai pencerminan Warga Negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan negara. Usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjumpai sedikit kendala yakni tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang masih relatif rendah.

Ditinjau dari pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan pemerintah daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melakukan percepatan pembangunan daerah masing-masing. Beberapa pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat yakni pajak penghasilan (Pph), pajak pertambahan nilai (Ppn), dan pajak pembelian barang mewah (PPnBM). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah antara lain adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. (Marihot P, Siahaan : 2005 :9)

Pada era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak Tahun 2000 Pemerintah menghendaki Daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaannya yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Basri dalam Zulkarnain (20 : 2011) “ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal“ . Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya .

Pendapatan Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pajak Daerah merupakan Iuran yang wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pajak Daerah merupakan Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. (Marihot P. Siahaan : 10 : 2005)

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak dan Badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 1. Pajak Kendraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendraaan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan dan
 5. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam melakukan Pembangunan suatu Daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan Daerah untuk membangun Daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Restoran.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif pemungut Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.

Dilihat pada kehidupan ekonomi Indonesia sekarang ini amat berkembang dengan pesat terlebih lagi dengan kondisi pasar yang telah mengarah kepada perdagangan bebas. Semakin banyak pengunjung yang datang ataupun yang melakukan usaha dalam negara kita, tentu tidak terlepas dari Pajak. Dan dalam hal ini merupakan kesempatan bagi Daerah kita untuk meningkatkan Pendapatan dan salah satunya melalui Pajak Restoran. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah lebih tanggap dalam menangkap peluang dalam meningkatkan Pendapatan kas Daerah.

Dalam pemungutan Pajak sangat diperlukan Peranan Aparat Pemerintah Daerah, dalam mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggerakkan Wajib Pajak untuk melunasi Pajak Restoran. Disamping hal tersebut Peranan Pemerintah Daerah diperlukan sekali dalam pengawasan alur penerimaan Pajak Restoran dari Wajib Pajak sampai ketempat pembayaran.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang baru berkembang yang seperti Kabupaten lainnya harus mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran agar seluruh warganya yang menjadi Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Restoran guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Riau, adalah suatu Daerah yang juga berhak, berwewenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Daerah, khususnya dalam hal Pajak Restoran.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta melihat langsung bagaimana Undang-undang yang telah dirumuskan oleh Pemerintah dapat dilaksanakan dengan Baik. Maka Penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu:

“ Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Restoran “ .

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas maka Penulis merumuskan permasalahan yang diangkat yaitu : Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari Sektor pajak Restoran ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Restoran.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai aplikasi ilmu Pengetahuan bagi Penulis, Khusus di bidang Pajak Restoran yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan Pajak Restoran.

3. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh.
4. Sebagai sarana informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap objek yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) yang beralamat Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan februari s/d april 2012 di Isnstansi Pemerintah yakni DISPENDA Kabupaten Kuantan Singingi .

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan) melalui wawancara, yang dalam hal ini wawancara diberikan kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran dan Kassubag program Peserta pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa dokumen, arsip instansi dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Penulis juga menggunakan metode observasi, dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap karyawan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Metode Wawancara

Didalam pengumpulan data Penulis memilih metode wawancara dimana penulis dapat menanyakan secara langsung tentang upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Terutama Pajak Restoran kepada Kepala bagian perpajakan, kasi Pendataan dan Pendaftaran, kasubbag program, dan pegawai Dispenda yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen .

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis data, dan dalam hal ini Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan bukan berbentuk angka-angka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam empat (4) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode pengumpulan Data, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah

Bab ini mengemukakan sejarah singkat Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Uraian tugas.

Bab III: Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini mengemukakan tentang pengertian pajak dan Fungsinya, pengertian pajak restoran, objek dan subjek pajak restoran, tarif , Dasar hukum pemungutan pajak restoran dan bab ini juga membahas tentang Upaya Pemkab Kuansing dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No.53 Tahun 1999.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 Km² Dengan Jumlah Penduduk 246.253 jiwa dengan Ibu kota Teluk Kuantan . Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 11 kelurahan dan 198 Desa.

Adapun yang pernah menjadi kepala dinas Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

1. Hj.Yonatan Marbun SE.MM
2. Drs.Hj.Rasiman Rauf M.Si
3. Hj.Muharlius SE.MM
4. Drs.Hj.Darwin Yohanis
5. Drs.H.Sumarli,MM

2.2 Visi dan Misi

1. Visi

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat yang Ramah, Profesional dan Inovatif ”.

1. Optimalisasi: Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah: Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur dinas pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.
3. Profesional: Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif: Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2. Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Retribusi
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam Rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk Operasional yang terarah berupa Tujuan dan Sasaran yakni:

1. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak
4. Meningkatnya Sosialisasi Produk-produk hukum Pajak dan Retribusi Daerah

2. Sasaran

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target Pendapatan Daerah minimal 10% dari tahun sebelumnya
2. Terlaksananya Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. Terlaksananya Pelayanan dan Penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib
5. Terlaksananya penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel
6. Terlaksananya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah
7. Terpenuhnya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah

10. Tewujudnya kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya
11. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh unit kerja pengelolaan Pajak/Retribusi Daerah
12. Terlaksananya pendidikan pelatihan teknis bagi pegawai

2.4 Dasar Hukum Pembentukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

1. Dasar Hukum Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 tentang pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) Kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan Pengendalian.
2. Pelatihan bidang Pendapatan.

3. Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial bidang Pendapatan.
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang Pendapatan.
5. Penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah.
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan Peningkatan Pendapatan Daerah.
8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Pendapatan Daerah.
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Pendapatan yang wajib dilaksanakan.
11. Penyusunan rencana bidang Pendapatan.
12. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa.
13. Penyelenggaraan sistem bidang Pendapatan Daerah.
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan.
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Perundang-undangan bidang Pendapatan Daerah.
16. Penetapan dan pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Susunan Organisasi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah

1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi

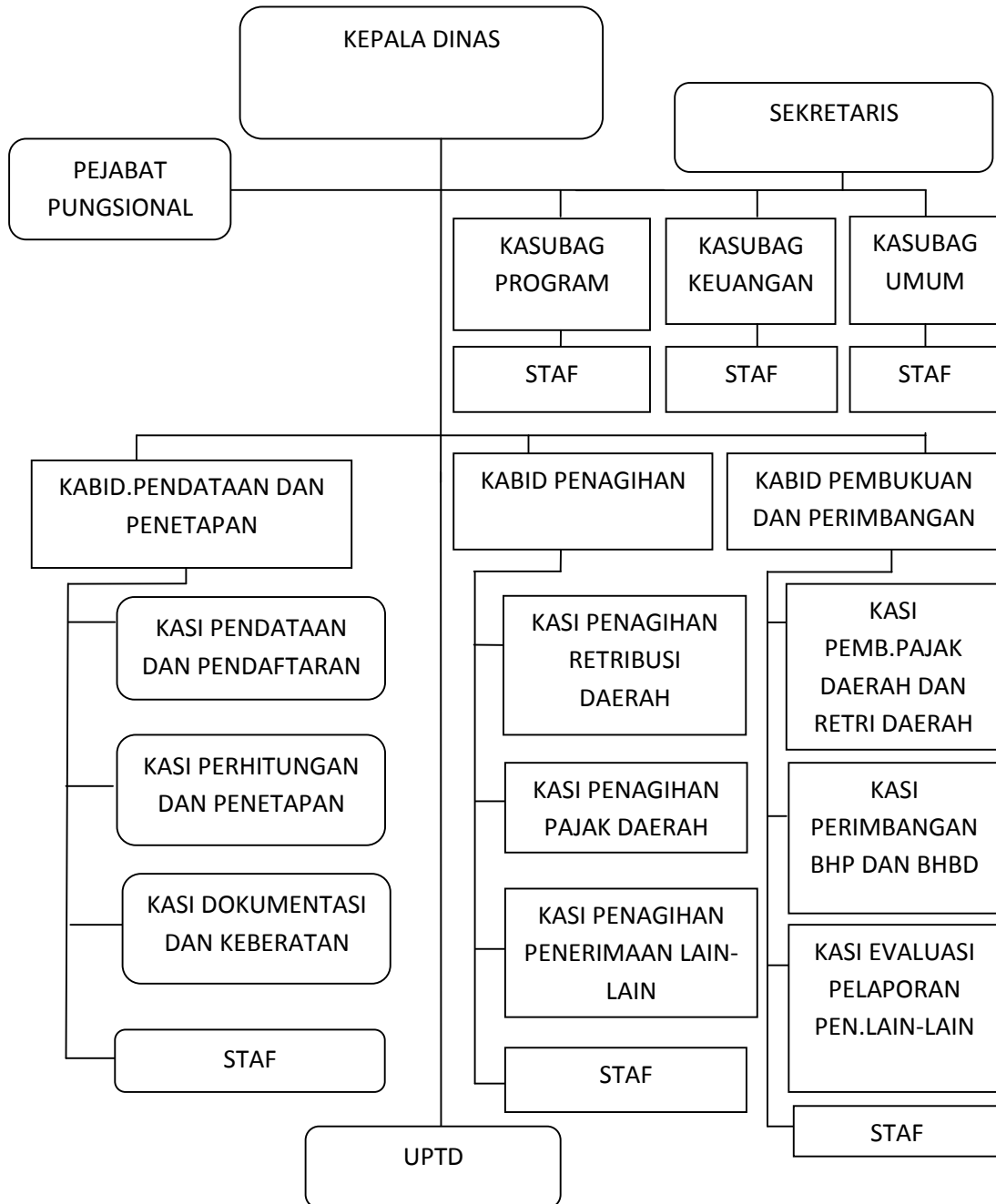
1. Kepala Dinas: Drs.H.SUMARLI,MM
2. Sekretariat: Drs.H.SIMBOLON,M.Si
 1. Kasubbag Program: SAPTUDIS,SE
 2. Kasubbag Umum: HERRY ANDRIKO,SE
 3. Kasubbag Keuangan: DESY EDYANINGSI,SE
3. Kabid Pendataan dan Penetapan: SABARUDIN
 1. Kasi Pendataan dan Pendaftaran: DEDI APRIANTO,S.Sos
 2. Kasi Perhitungan dan Penetapan: FISKAL DERMAWAN,SE
 3. Kasi Dokumentasi dan Keberatan: NURNANINGSIH,S.Sos
4. Kabid Penagihan: Drs.PRIMADIAN
 1. Kasi Penagihan Retribusi Daerah: R.SAHDAN,SE
 2. Kasi Penagihan Pajak Daerah: Hj.PRIMA SARI,ST,SE.AK
 3. Kasi Penagihan Penerimaan Lain-lain: INDRAMISWATI,SE
5. Kabid Pembukuan dan Perimbangan Keuangan: AKMAL
 1. Kasi Pemb Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: MERRYNCE,SE
 2. Kasi Perimbangan BHP dan BHBP: NELMA SASMITA,SE
 3. Kasi Evaluasi,Pelaporan dan Pen.Lain-lain: NOVA SURYA DEWI,SE.AK

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi, maka perlu adanya perencanaan dan perumusan struktur organisasi. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Agar semua itu dapat tercapai maka orang-orang yang bekerja sama harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya serta kepada siapa ia bertanggung jawab akan tugas yang telah dilakukan. Oleh karena itu suatu bagan yang memberikan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja setiap individu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi.

Gambar II.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISPENDA KAB. KUANSING



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.6 Kondisi Kepegawaian

- a. Pengisian struktur jabatan dan eselonering Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008.
- b. Prosentase struktur jabatan yang terisi pada Dinas Pendapatan sudah 100%
- c. Prosentase struktur jabatan yang telah memenuhi persyaratan pendidikan Formal sesuai bidang tugasnya terisi pada Dinas Pendapatan sebanyak 100%
- d. Pejabat pada Dinas Pendapatan yang belum memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan hanya 1 orang
- e. Prosentase pejabat pada Dinas Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 100%
- f. Kondisi Kepegawaian Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 berjumlah 68(enam puluh delapan) orang terdiri dari :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil 49(empat puluh sembilan) orang
 - (2) Pegawai Honor 19 (Sembilan belas) orang

Tabel II.1
Kondisi Kepegawaian Dinas Pendapatan
Kabupaten Kuantan Singingi dari Tahun 2008 s/d 2011

No	Uraian	TAHUN			
		2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah PNS	50	49	49	46
2	Jumlah Pegawai Honor	20	19	17	16
3	Jabatan Struktural :				
	Eselon II	1	1	1	1
	Eselon III	6	4	4	4
	Eselon IV	12	10	11	12
	Eselon V	-	-	-	-
4	Golongan :				
	IV/c	1	1	1	1
	IV/b	1	1	1	3
	IV/a	5	3	3	1
	III/d	2	1	1	1
	III/c	11	7	7	3
	III/b	-	5	4	9
	III/a	11	9	13	14
	II/d	-	-	-	-
	II/c	2	3	3	2
	II/b	2	1	1	4
	II/a	16	17	13	7
	I/d	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	1
	I/a	-	1	1	-
5	Pendidikan Formal :				
	S-3	-	-		
	S-2	1	1	1	2
	S-1	21	21	25	25
	D-3	2	2	3	3
	D-2	-	-	-	-
	SLTA	24	23	18	12
	SLTP	1	1	1	1
	SD	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

2.7 Uraian tugas (Job Description)

1. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang pendapatan.

2. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Bidang Penagihan

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang penagihan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.

5. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan

1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala bidang pembukuan dan perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi

hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

3.A.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2008 : 1) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Markus Muda (2005 : 1) Pajak adalah Sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-undang, Wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara , serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi.

Menurut Waluyo (2008 : 2) Pajak adalah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan,dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara berupa uang
2. Berdasarkan Undang-undang

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung

3.A.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan Pengeluaran-pengeluaran Pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.A.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi tiga bagian, yakni :

1. Menurut golongan

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak Objektif yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutannya

1. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Adapun yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Cukai, Bea Materai.
2. Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten atau Kota

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3.A.4 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang .

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .

3.A.5 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Pemungutan pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Yani Ahmad (2002 : 48) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (2011 : 25) Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Menurut Siahaan P Marihot (2005 : 272-273) Dalam pungutan Pajak Restoran terdapat beberapa Terminologi yaitu:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga, dan catering.
2. Pengusaha Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah makan.

3. Pembayaran adalah Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.

3.A.6 Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran

Dasar Hukum Pungutan Pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran atas perubahan Nomor 04 Tahun 2001 .

3.A.7 Subjek Pajak Restoran

1. Subjek Pajak Restoran

Yang menjadi Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

2. Wajib Pajak Restoran

Yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang Rumah Makan.

3.A.8 Objek Pajak Restoran

1. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan Pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah Rumah Makan, Café, Bar, dan sejenisnya. Pelayanan Restoran meliputi penjualan makanan dan minuman di Restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang.

2. Bukan Objek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran atau Rumah Makan dikenakan Pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak, yaitu:

1. Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
2. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan

yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, Misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000,000,00 per Tahun.

3.A.9 Dasar Pengenaan,Tarif, dan cara Perhitungan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan

istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

2. Tarif Pajak Restoran

Perhitungan Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%) .

3. Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Perhitngan Pajak Restoran

Pajak terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran .

3.A.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penerimaan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok sebagaimana dibawah ini.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Hasil Pajak Daerah

Merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

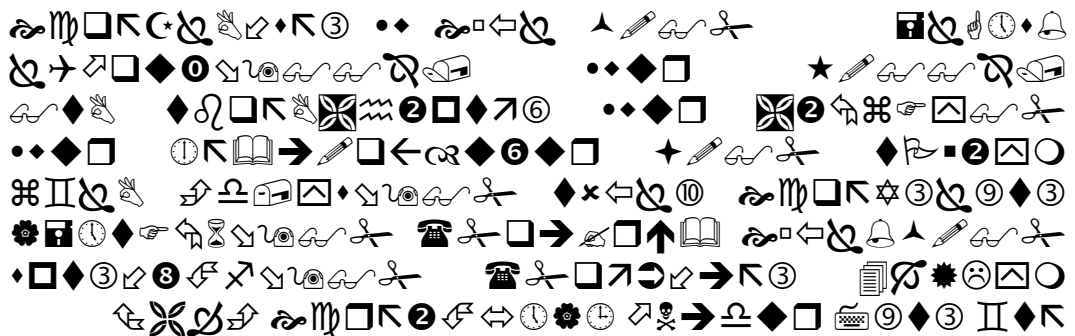
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain :

- 1). Bagian laba
 - 2). Deviden dan penjualan saham milik daerah
 - 3). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.
2. Dana Perimbangan, Yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 3. Pinjaman Daerah, Yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
 4. Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain hibah atau penerimaan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya. **(Marihot P. Siahaan, 2005 :14)**

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya menurunnya daya saing daerah.

3.A.11 Pajak menurut Syari'at Islam

Adapun mengenai pajak dalam islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 29.



Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al- kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk ’’. (Al-Taubah ayat 29).

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah Pajak perkepala yang dipungut oleh Pemerintah Islam dari oarang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman (definisi) yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. (ibadah). Jika hal itu bukan perintah , ia tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tertentu bernilai Jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan

(kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah : 99 : 7). Dan sebagaimana hadis Rasulullah Saw : Yang artinya : “ Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali kerumahnya “. (HR. Abu Daud dari Rafi’ bin Khudaij). Hadis ini di shihkan oleh Al-Albani.

Karakteristik Pajak (dharibah) menurut syari’at Islam :

1. Pajak (dharibah) bersimpat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika dibaitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Islam. Sebab, dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sebab Orang kaya adalah orang yang memiliki

kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non Islam, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori Pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.
(Gusfahmi, 2007 : 34) .

B. Tinjauan Praktek

3.B.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi di dapat dari berbagai sektor termasuk dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain sebagainya, berikut ini data sektor-sektor yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 :

Tabel III.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kuantan Singingi (Dalam Rupiah)

TH	Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak	Retribusi	Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang sah
2008	3.037.302.295,00	1.156.064.899	2.001.313.301	2.773.014.617,86
2009	3.525.619.693,20	5.096.796.669	7.095.053.684	50.485.026.428,01
2010	4.055.657.530,20	1.192.126.281	3.233.618.989	726.411.800,00
2011	5.220.409.726,02	8.362.218.218	4.133.117.741	6.039.994.347,00
Jml	15.838.989.244,42	15.807.206.067	16.463.103.715	19.356.550.785,16

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan data Tabel III.1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dipengaruhi oleh sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor Lain-lain PAD yang sah merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Selama empat tahun (2008-2009), PAD Kabupaten Kuantan Singingi disumbangkan dari sektor Lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp.19.356.550.785,16, Sektor Pajak sebanyak Rp.15.838.989.244,42, Sektor Retribusi sebanyak Rp.15.807.206.067,00, Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.16.463.103.715,00.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang pertama adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan sektor yang mengalami

peningkatan setiap tahunnya, sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang perlu dikelola dengan baik. Berikut ini Prosentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.2
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	3.037.302.295,00	25.380.245.966,18	11,9%
2009	3.525.619.693,20	23.147.073.224,50	15,2%
2010	4.055.657.530,20	21.435.798.449,76	18,9%
2011	5.220.409.726,02	23.755.740.032,02	21,9%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.2, Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dengan rata-rata 9,5% selama empat tahun dari tahun 2008-2009. Pada Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Dimana pada tahun 2008, sektor pajak berkontribusi dalam membangun jumlah PAD Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 11,9%, Tahun 2009 meningkat sebesar 15,2%, tahun 2010 meningkat sebesar 18,9%, untuk tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 21,9% .

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang kedua adalah Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2011 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan dan menurut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Retribusi Daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negarabagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung , yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatanpada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.

Berikut ini Prosentase Kontribusi Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	1.156.064.899,00	25.380.245.966,18	4,5%
2009	5.096.796.669,00	23.147.073.224,50	22,0%
2010	1.192.126.281,00	21.435.798.449,76	5,6%
2011	8.362.218.218,00	23.755.740.032,02	35,2%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.3, Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang ketiga terbesar terhadap PAD Kabupaten Kuansing dengan rata-rata 16,81% selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2008-2011. Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor retribusi memberikan kontribusi yang baik setiap tahunnya. Dimana tahun 2008 retribusi berkontribusi mambangun jumlah PAD sebesar Rp. 1.156.064.899,00 atau sebesar 4,5%. Tahun 2009 retribusi berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar Rp. 5.096.796.669,00 atau sebesar 22,0% . Di tahun 2010 kontribusi retribusi dalam membangun PAD mengalami penurunan dengan jumlah Rp. 1.192.126.281,00 atau sebesar 5,56%. Untuk tahun

2011 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah Rp. 8.362.218.218,00 atau sebesar 35,2% dari jumlah PAD.

Menurut Bapak Dedy Aprianto sebagai Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan wawancara pada maret 2012 penyebab menurunnya pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor retribusi Daerah pada tahun 2010 disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, tidak tepat waktu membayar kewajibannya karena proses administrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran masyarakat tersebut akan pentingnya retribusi bagi penerimaan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ketiga adalah Laba Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sektor ini menunjukkan kemampuan dari perusahaan milik daerah, seperti PT.RAPP Sektor Cerenti, PT.RAPP Sektor Logas, PT.Tri Bakti Sarimas, PT.Adimulia Agro Lestari dan lain sebagainya, Perusahaan milik Daerah ini dalam memberikan laba sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga diperlukan manajerial yang profesional dan strategi pemasaran yang kreatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan untuk optimalisasi laba perusahaan.

Tabel III.4
Kontribusi Laba Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	2.001.313.301,00	25.380.245.966,18	7,8%
2009	7.095.053.684,00	23.147.073.224,50	30,6%
2010	3.233.618.989,00	21.435.798.449,76	15,0%
2011	4.133.117.741,00	23.755.740.032,02	17,4%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan dari Tabel III.4, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang kedua terbesar terhadap PAD Kabupaten Kuansing dengan rata-rata 10,95% selama kurun waktu empat tahun dari tahun 2008-2011. Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dan pengelolaan kekayaan daerah ini memberikan kontribusi yang cukup baik setiap tahunnya.

Dimana tahun 2008 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar Rp. 2.001.313.301,00 atau sebesar 7,8%. Tahun 2009 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar Rp.7.095.053.684,00 atau sebesar 30,6% . Di tahun 2010 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam membangun PAD mengalami penurunan dengan jumlah Rp.3.233.618.989,00 atau sebesar 15,0%. Untuk tahun 2011 mengalami

peningkatan kembali dengan jumlah Rp. 4.133.117.741,00 atau sebesar 17,4% dari jumlah PAD.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibuk Nurnaningsih sebagai Kasi Dokumentasi dan Keberatan Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan maret 2012 penyebab turunnya Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat tersebut akan pentingnya pengelolaan kekayaan yang dipisahkan bagi penerimaan dan pembangunan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yang keempat adalah Penerimaan yang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun sumber-sumber penerimaan lain-lain adalah : hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah dan lain sebagainya. Berikut ini prosentase kontribusi penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.5
Kontribusi Penerimaan Lain-lain yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2008	2.773.014.617,86	25.380.245.966,18	10,9%
2009	50.485.026.428,01	23.147.073.224,50	218,1%
2010	726.411.800,00	21.435.798.449,76	3,3%
2011	6.039.994.347,00	23.755.740.032,02	25,4%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.5, Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi pada urutan yang pertama dengan rata-rata 61,95% selama kurun waktu empat tahun (2008-2011). Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah daerah ini memberikan kontribusi yang cukup baik setiap tahunnya. Yang dimaksud Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro dan lain sebagainya.

Dimana tahun 2008 Lain-lain PAD yang sah berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar Rp. 2.773.014.617,86 atau sebesar 10,9%. Tahun 2009 Lain-lain PAD yang sah berkontribusi membangun jumlah PAD sangat bagus sebesar Rp. 50.485.026.428,01 atau sebesar 218,1% . Di tahun 2010 kontribusi Lain-lain PAD yang sah dalam membangun PAD mengalami penurunan dengan jumlah Rp.726.411.800,00 atau sebesar 3,3 %. Untuk tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah Rp. 6.039.994.347,00 atau sebesar 25,4% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada Maret Tahun 2012 salah satu penyebab menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu karena proses administrasi pembayaran yang rumit, tidak mengertinya tata cara pembayaran, fasilitas kurang memadai dan sosialisasi pembayaran yang tidak berjalan dengan efektif.

3.B.2 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi

Pajak daerah merupakan sumber keuangan yang potensial karena begitu banyaknya jenis pajak yang dapat di pungut dan dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengali sumber-sumber penerimaannya. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pajak restoran. Adapun jumlah penerimaan dari pajak restoran di Kabupaten Kuantan Singingi empat tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel III.6
Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011
Periode 31 Desember

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2008	370.000.000,00	896.459.659,00	242,29
2009	700.000.000,00	933.480.341,00	133,35
2010	730.000.000,00	803.965.624,00	110,13
2011	803.000.000,00	973.455.663,00	121,23

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.6, Realisasi Pajak Restoran dari tahun ketahun terus meningkat dari target, yakni target sebesar Rp.370.000.000,00 sedangkan realisasi tahun 2008 sebesar Rp.896.459.659,00 atau 242,29% dan hasil dari tahun 2009 mencapai Rp.933.480.341 atau 133,35% dari target sebesar Rp.700.000.000,00, realisasi tahun 2010 sebesar Rp.803.965.624 atau 110,13% dari target sebesar 730.000.000,00, realisasi tahun 2011 sebesar Rp.973.455.663 atau 121,23% dengan target sebesar Rp.803.000.000,00.

Meningkatnya jumlah Penerimaan Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran dari tahun ke tahun, bahkan melebihi target yang ditetapkan

disebabkan karena perkembangan jumlah wajib pajak restoran terus meningkat, seperti yang digambarkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.7
Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Restoran
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011

Tahun	Jumlah WP / WR	Pajak Restoran (Rp)
2008	210	110.839.404.12
2009	272	135.631.108.12
2010	307	149.720.348.00
2011	309	973.455.663.00
Jumlah	1096	1.369.646.523.24

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.7, Terlihat bahwa Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan sebesar 62 jumlah wajib pajak dan pada tahun 2009-2010 juga mengalami peningkatan sebesar 35 wajib pajak dan pada tahun 2010-2011 tidak terjadi peningkatan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pemerintah Kabupaten Kuansing dari sektor Pajak Restoran sangat penting dalam membentuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bahwasannya Pajak Restoran perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

3.B.3 Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Restoran memberikan peranan yang cukup bearti bagi sektor PAD maupun sektor Pajak Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini tergambar dalam kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Tabel III.8
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Restoran	PAD	Kontribusi
2008	110.839.404,12	25.380.245.966,18	0,4%
2009	135.631.108,12	23.147.073.224,50	0,6%
2010	149.720.348,00	21.435.798.449,76	0,7%
2011	973.455.663,00	23.755.740.032,02	4,09%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.8, terlihat bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu empat tahun dengan rata-rata 1,44%. Dapat terlihat dari tabel diatas, kontribusi dari sektor Pajak Restoran dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dalam artian kata selalu meningkat. Pajak Restoran dalam penerimaan daerah ini memberikan kontribusi yang baik pada setiap tahunnya.

Dimana tahun 2008 Pajak Restoran berkontribusi membangun jumlah PAD sebesar Rp. 110.839.404,12 atau sebesar 0,4%. Tahun 2009 Pajak Restoran berkontribusi membangun jumlah PAD mengalami peningkatan sebesar Rp.135.631.108,12 atau 0,6% . Di tahun 2010 kontribusi Pajak Restoran dalam membangun PAD mengalami peningkatan kembali dengan jumlah Rp.149.720.348,00 atau 0,7%. Untuk tahun 2011 Pajak Restoran berkontribusi sangat baik dengan jumlah sebesar Rp. 973.455.663,00 atau sebesar 4,09% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pegawai Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi pada Maret Tahun 2012 penyebab terus meningkatnya Penerimaan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran karena banyaknya masyarakat yang melakukan usaha dalam bidang pajak restoran

sehingga wajib pajak terus meningkat dan kesadaran masyarakat mulai muncul karena melihat betapa pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan daerah dan seringnya sosialisasi dari pegawai Dispenda kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi penerimaan dan pembangunan daerah.

Sebagai salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, peran pajak restoran sangat berkontribusi dalam membentuk jumlah penerimaan sektor pajak daerah. Berikut ini Tabel yang menunjukkan tentang jumlah kontribusi pajak restoran terhadap sektor pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.9
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2011 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Daerah	Kontribusi
2008	110.839.404,12	956.681.498,60	11,5%
2009	135.631.108,12	3.525.619.693,20	3,84%
2010	149.720.348,00	4.055.657.530,20	3,7%
2011	973.455.663,00	5.220.409.726,02	18,65%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuansing

Berdasarkan Tabel III.9, terlihat bahwa Kontribusi Pajak Restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu empat tahun rata-rata 9,47%. Hal ini menunjukkan penerimaan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor Pajak Restoran cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, hal ini dibuktikan dari kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dimana pada tahun 2008, Pajak Restoran berkontribusi pada Pajak Daerah sebesar Rp.110.839.404,12 atau 11,5%. Pada tahun 2009 pajak restoran berkontribusi sebesar Rp. 135.631.108,12 atau 3,84%, dan pada tahun 2010 pajak

restoran berkontribusi sebesar Rp. 149.720.348,00 atau 3,7%, dan pada tahun 2011 pajak restoran berkontribusi pada pajak daerah sebesar Rp.973.455.663,00 atau 18,65% .

3.B.4 Jenis Pajak yang dipungut di Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun jenis pajak yang dipungut di kabupaten Kuantan Singingi dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.10
Kontribusi Jenis Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	PAD	Kontribusi
Pajak Hotel	132.690.375,00	21.435.798.449,76	0,61%
Pajak Restoran	803.965.624,00	21.435.798.449,76	3,75%
Pajak Hiburan	2.180.000,00	21.435.798.449,76	0,01%
Pajak Reklame	157.135.625,00	21.435.798.449,76	0,73%
Pajak Penerangan Jalan	2.870.981.847,72	21.435.798.449,76	13,3%
Pajak Pengambilan Bahan Galian C	88.704.058,48	21.435.798.449,76	0,41%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel III.10, Terlihat bahwa dari jenis masing-masing pajak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi . Dimana Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 13,3% dan yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pajak Hiburan sebesar 0,01% .

3.B.5 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi

Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang penting bagi pembelanjaan dan pembangunan daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Keberhasilan pemungutan ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kabupaten Kuantan Singingi mengambil upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari sektor pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Dengan cara melakukan pengawasan terhadap restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi patuh atau tidak sebagai wajib pajak.
2. Melakukan penyuluhan atau pendataan langsung kelapangan terhadap restoran-restoran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti arti pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
4. Memberikan selebaran-selebaran kepada masyarakat yang sering makan/minum kerestoran atau memberitahukan kepada pengunjung bahwasannya restoran tersebut sudah dikenakan pajak dengan tarif 10% .
5. Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang tinggi .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Restoran dikategorikan cukup, dengan setiap tahun pegawai dispenda melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Hasil penerimaan Pajak, khususnya Pajak Restoran dari tahun ke tahun terus meningkat. Seiring dengan meningkatnya Wajib Pajak Restoran dalam empat tahun terakhir, sehingga Pajak Restoran mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi pajak restoran .

Namun sayangnya selama ini Penerapan tarif Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku melainkan berdasarkan hasil Negosiasi antara Wajib Pajak dengan pemungut Pajak .

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada wajib pajak, diharapkan dengan hal seperti itu dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.
2. Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media dan tidak mempersulit sistem atau prosedur pembayaran pajak.
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus meningkatkan kompetensi petugas penerimaan pajak restoran untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemungutan pajak restoran dan mengkaji potensi pajak restoran yang belum dioptimalkan. Upaya tersebut harus didukung oleh pengawasan secara terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilapangan.
5. Memberikan predikat kepada wajib pajak yang patuh kepada wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Dadi, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan*, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Afrizal, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Untuk Kalangan Pribadi, Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau, 2009.
- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007 .
- Buku Saku Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 2008 .
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Andi, Yogyakarta, 2008 .
- Marihot P, Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 .
- Markus Muda, *Perpajakan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Setiawan Agus dan Musri Basri, *Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Suandy Erly, *Perencanaan Pajak Edisi 4*, Selemba Empat, Jakarta, 2009 .
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Visi Media, Jakarta, 2011 .

Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 8*, Salemba Empat, Jakarta, 2008 .

Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 .